



Australian Government

STRATEGI KESETARAAN GENDER & INKLUSI SOSIAL KOMPAK 2017-2018

KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia
Dikelola oleh Abt Associates

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

**STRATEGI KESETARAAN GENDER & INKLUSI SOSIAL
KOMPAK 2017-2018**

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

Singkatan dan Akronim	3
1. Pendahuluan	4
2. Konteks Program	5
2.1. Gambaran Umum KOMPAK	5
2.2. Komitmen Legislatif dan Kebijakan Pemerintah Indonesia	6
2.3. Persoalan Gender dan Inklusi Sosial yang Relevan dengan Fokus KOMPAK	6
3. Kerangka GESI KOMPAK.....	12
3.1. Pendekatan dan Fokus	12
3.2. Teori Perubahan GESI	12
3.3. Pemantauan dan Evaluasi	14
4. Kelompok Sasaran dan Mitra	17
5. Proses, Budaya Kerja dan Kelembagaan KOMPAK.....	19
Lampiran	20
Referensi	27

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Strategis KOMPAK	5
---	---

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Utama Gender, Perbandingan Indonesia dan Regional (data 2014)	7
Tabel 2. Strategi GESI dalam Kaitannya dengan Capaian Akhir KOMPAK.....	12
Tabel 3. Kerangka Penilaian Kinerja GESI KOMPAK	15
Tabel 4. Mitra-Mitra Strategis KOMPAK.....	17
Tabel 5. Mitra Pemanfaatan Investasi Pemerintah Australia melalui KOMPAK	18

AIPJ	Kemitraan Indonesia-Australia untuk Keadilan	Australia Indonesia Partnership for Justice
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Department of National Development Planning
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia	The Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Foundation
BPS	Badan Pusat Statistik	Central Statistics Bureau
CEDAW	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women
CRPD	Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil	Civil Society Organization
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade	The Department of Foreign Affairs and Trade
GoA	Pemerintah Australia	The Government of Australia
Gol	Pemerintah Indonesia	The Government of Indonesia
GESI	Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	Gender Equality and Social Inclusion
IRE	Institut Kajian dan Pemberdayaan	Institute for Research and Empowerment
Inpres	Instruksi Presiden	Presidential Instruction
KDP		Kecamatan Development Program
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan	
KPI	Koalisi Perempuan Indonesia	Indonesian Women's Coalition
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi	The Corruption Eradication Commission
KSI		The Knowledge Sector Initiative
MoHA	Kementerian Dalam Negeri	The Ministry of Home Affairs
MoV	Kementerian Desa	The Ministry of Villages
MoF	Kementerian Keuangan	The Ministry of Finance
MAMPU	Maju Perempuan Indonesia	Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction
KPI	Koalisi Perempuan Indonesia	Indonesia Women's Coalition
PDB/GDP	Pendapatan Domestik Bruto	Gross Domestic Product
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga	Women Headed Households Empowerment Association
Permen	Peraturan Menteri	Ministerial regulation
Podes	Pendataan Potensi Desa	Village Potential Statistic
PUSKAPA UI	Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia	Centre on Child Protection University of Indonesia
SDGs	Target Pembangunan Berkelanjutan	Sustainable Development Goals
SPAK	Saya Perempuan Anti Korupsi	
TAF		The Asia Foundation
UNESCAP		United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

1. Pendahuluan

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan. Secara umum, tujuan KOMPAK untuk tahap pertama (2015-2018) adalah mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar, mendorong pembangunan yang berorientasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan meningkatkan kesempatan kerja di luar sektor pertanian serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Kerangka perencanaan pembangunan nasional Indonesia (2005-2025) mencantumkan visi pembangunan mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 'Adil' didefinisikan sebagai bebas dari diskriminasi atau keterbatasan dalam segala bentuk, baik antar individu, atas dasar gender, maupun asal usul. RPJMN memiliki strategi khusus untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui: fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan perdesaan, dan penguatan kapasitas masyarakat perdesaan dan masyarakat adat.¹

Pernyataan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan nasional Indonesia (Nawacita) dan RPJMN menetapkan target nasional pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 6-8 persen per tahun, pengurangan kemiskinan sebesar 7-8 persen dan mengurangi koefisien Gini menjadi 0,36 pada tahun 2019.² Pemerintah juga telah menetapkan target spesifik untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bagi 40 persen penduduk termiskin.

Pemerintah Australia telah menyatakan komitmen yang kuat untuk 'berada di garis depan dalam upaya memberdayakan perempuan dan anak perempuan dan mendorong kesetaraan gender di wilayah Indo-Pasifik'. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu dari enam prioritas investasi bagi hibah pembangunan Australia dan lebih dari 80 persen dari semua program, terlepas dari tujuannya, dituntut untuk secara efektif memerhatikan persoalan gender dalam pelaksanaannya.³ Selain itu, pemerintah Australia juga telah berkomitmen untuk berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di negara-negara berkembang untuk memastikan program pembangunan tidak meninggalkan siapapun, tanpa terkecuali.⁴

Strategi ini akan menjelaskan bagaimana KOMPAK merespon komitmen-komitmen kebijakan tersebut. Strategi ini dikembangkan sesuai dengan kerangka strategis kinerja dan penilaian KOMPAK secara umum. Ini adalah dokumen bertumbuh yang akan diperbaharui dan disempurnakan seiring perkembangan KOMPAK.

¹ Bappenas (2014), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015–2019*, GOI: Jakarta. hal.6.

² Bappenas (2016), perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan di Indonesia: menuju sistem yang komprehensif, Vivi Yulaswati – Direktur Pengurangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, materi presentasi. hal.6.

³ Departemen Luar Negeri dan Perdagangan - Pemerintah Australia (*Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Government*), 2016: Gender equality and women's empowerment strategy. hal.1.

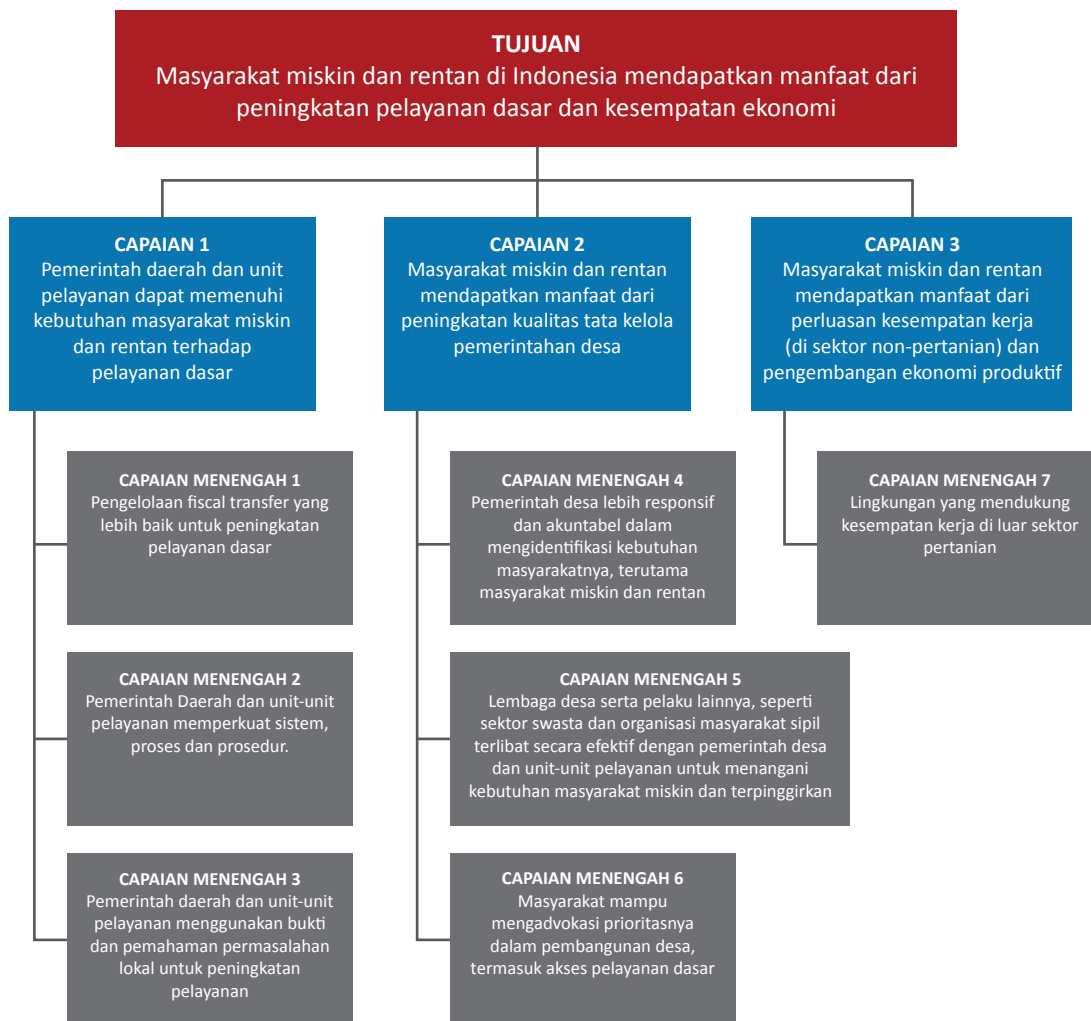
⁴ Departemen Luar Negeri dan Perdagangan - Pemerintah Australia (*Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Government*), 2015: Development for all 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program. hal.1.

2.1. Gambaran Umum KOMPAK

KOMPAK adalah kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan. Secara umum, tujuan KOMPAK untuk tahap pertamanya (2015-2018) adalah mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar, mendorong pembangunan yang berorientasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan meningkatkan kesempatan kerja di luar sektor pertanian serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Bekerja baik pada tingkat nasional dan sub-nasional, KOMPAK mengkonsolidasi dan mengembangkan investasi Pemerintah Australia sebelumnya dalam pemberdayaan masyarakat, pelayanan, tata kelola, dan penguatan masyarakat sipil, dengan mengintegrasikan bidang-bidang kegiatan ini ke dalam sebuah Fasilitas tunggal. KOMPAK merancang kerja-kerjanya berdasarkan tiga Capaian Akhir Fasilitas dan inovasi-inovasi, di mana strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial berlaku secara umum. Kerangka Strategis KOMPAK secara umum ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Strategis KOMPAK



2.2. Komitmen Legislatif dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk peningkatan kesetaraan gender, dan juga telah membuat komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas. Serangkaian kebijakan dan peraturan yang relevan terhadap dua hal tersebut dipaparkan pada Lampiran 1. Pada tingkat kebijakan tertinggi, hal ini mencakup pernyataan kesetaraan semua orang dalam Konstitusi Republik Indonesia, ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) pada tahun 1984, dukungan suara bagi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) pada tahun 2007, dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Kaum Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Person with Disabilities*) pada tahun 2011.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.8 tentang penyandang disabilitas pada tahun 2016, dan rancangan undang-undang tentang keadilan dan kesetaraan gender juga tengah disusun namun proses pengesahannya di DPR tersendat. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sangat relevan dengan fokus KOMPAK terhadap tata kelola pemerintahan.

2.3. Persoalan Gender dan Inklusi Sosial yang Relevan dengan Fokus KOMPAK

Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan baru untuk mencapai target pengurangan kemiskinan dengan memperkuat integrasi investasinya di berbagai bidang pelayanan sosial berbasis masyarakat untuk kehidupan yang lebih keberlanjutan. Bagian berikut ini memberikan ulasan singkat tentang kondisi yang ada dan membahas persoalan gender dan inklusi sosial yang relevan dengan agenda pemerintah, dan sesuai dengan fokus KOMPAK.

Konteks Umum

Gender. Ketimpangan dan marginalisasi atas dasar gender, disabilitas, etnisitas atau asal usul dipengaruhi, dan memengaruhi baik kehidupan privat maupun publik. Pemerintah dan penyelenggara pelayanan dasar memiliki tanggung jawab dan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan menegakkan hak-hak masyarakat yang paling rentan.

Koefisien Gini⁵ di Indonesia terus meningkat dari 0,31 pada tahun 2001 menjadi 0,413 pada akhir tahun 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya penurunan sampai dengan 0,397 pada bulan Maret 2016,⁶ namun angka ini tetap tinggi jika dibandingkan dengan standar regional dan negara maju. Ketimpangan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kerekatan, juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan adanya hambatan ketenagakerjaan dan investasi yang lebih rendah.⁷

Ketidaksetaraan sangat erat kaitannya dengan eksklusivitas sosial. Eksklusivitas sosial dapat mendorong masyarakat miskin ke dalam kemiskinan lebih dalam, dan semakin mempersulit mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka yang terekklusivitas



Gambar 1: Perempuan Indonesia di dapur tradisional pada abad ke-21. Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan beban ganda pada area produktif, reproduksi, dan kerja kemasyarakatan, dapat meminggirkan mereka dari proses pembangunan.

⁵ Indeks Gini adalah sebuah penilaian distribusi pendapatan penduduk suatu negara. Koefisien 0 mewakili kesetaraan maksimum, dan 1 (atau 100%, ketimpangan maksimum).

⁶ <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1280>

⁷ Arief, Rezki Lestari. 2008. Efek pertumbuhan dan perubahan ketimpangan pada pengurangan kemiskinan di Indonesia. Institute of Social Studies, The Hague, Belanda.

berdasarkan gender, ras, status sosial, etnisitas, agama atau orientasi seksual sering dihadapkan dengan berbagai bentuk perampasan/kehilangan hak dan kesempatan yang berakibat pada lebih rendahnya status sosial dan tingkat pendapatan; akses yang lebih terbatas pada kesempatan kerja dan pelayanan dasar, serta tidak adanya suara/pelibatan dalam pengambilan keputusan.

Seperti terlihat pada Tabel 1, capaian Indonesia terkait dengan indikator utama gender ternyata beragam, dengan hasil yang baik dalam pendidikan, dan hasil yang masih buruk khususnya dalam hal partisipasi angkatan kerja.

Tabel 1. Indikator Utama Gender, Perbandingan Indonesia dan Regional (data 2014)

Indikator Gender	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik
Angka kematian ibu (2015)	126 ^a	72
Tingkat kelahiran pada remaja (kelahiran per 1.000 ibu berusia 15-19)	48,3	21,2
Keterwakilan perempuan di parlemen (%)	17,1	18,7
Harapan hidup pada saat kelahiran	Perempuan	71
	Laki-laki	66,9
Perkiraan lama sekolah (dalam tahun)	Perempuan	13,1
	Laki-laki	12,9
Rata-rata lama sekolah	Perempuan	7
	Laki-laki	8,2
Jumlah penduduk yang sekurang-kurangnya berpendidikan menengah(%)	Perempuan	39,9
	Laki-laki	49,2
Tingkat partisipasi angkatan kerja(%)	Perempuan	51,4
	Laki-laki	84,2
Pendapatan Nasional Bruto per kapita	Perempuan	6.485
	Laki-laki	13.052
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perempuan	0,655
	Laki-laki	0,706
Rasio P-L/nilai Indeks Pembangunan Gender (<i>Gender Development Index - GDI</i>) ^b	0,927	0,948
Nilai Indeks Ketidaksetaraan Gender(<i>Gender Inequality Index</i>) ^c	0,494	0,328
Peringkat Indeks Ketidaksetaraan Gender	110	—

Sumber, kecuali dirujuk berbeda: UNDP (2015) *Human Development Report 2015: Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report*, Indonesia

^a WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division (2015) *Trends in Maternal Mortality 1990 to 2015: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division*. Geneva: WHO.

^b GDI adalah rasio perempuan terhadap IPM laki-laki. GDI mengukur ketidaksetaraan gender dalam pencapaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan (diukur dengan harapan hidup perempuan dan laki-laki saat lahir), pendidikan (diukur dengan perkiraan lama bersekolah pada anak perempuan dan laki-laki dan rata-rata tahun orang dewasa berusia 25 tahun ke atas); dan kendali atas sumber daya ekonomi (diukur dengan perkiraan GNI perempuan dan laki-laki per kapita).

^c Indeks Ketidaksetaraan Gender (Gender Inequality Index) mencerminkan ketidaksetaraan berdasarkan gender dalam tiga dimensi - kesehatan reproduksi (diukur melalui tingkat kematian ibu dan angka kelahiran remaja), pemberdayaan (diukur dengan jumlah kursi yang diperoleh perempuan di parlemen dan pencapaian pendidikan menengah dan tinggi oleh masing-masing gender), dan kegiatan ekonomi (diukur dengan tingkat partisipasi pasar tenaga kerja bagi perempuan dan laki-laki). Hal ini dapat diartikan sebagai kerugian dalam pembangunan manusia akibat ketimpangan capaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi ini.

Disabilitas merupakan penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan. Penyandang disabilitas (*Persons with Disabilities—PWD*) sebagian besar tetap terpinggirkan dalam kebijakan dan program pembangunan utama. Penelitian yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia⁸ menemukan adanya stigma negatif yang terkait dengan disabilitas di Indonesia, dan bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kemampuan serta cenderung dianggap sebagai beban bagi orang-orang di sekitar mereka. Kebijakan dan undang-undang masih didominasi dan dipengaruhi oleh pendekatan karitatif daripada pendekatan berbasis hak asasi manusia

Jumlah sesungguhnya penyandang disabilitas di Indonesia masih belum dapat ditentukan dengan akurat. Kementerian Sosial memperkirakan bahwa sebesar 4,87 persen dari total penduduk hidup dengan disabilitas⁹. WHO dan Bank Dunia memperkirakan bahwa jumlah penyandang disabilitas adalah sebesar 15 persen dari total penduduk dunia, di mana 80 persen dari mereka hidup dalam kemiskinan di negara-negara berkembang¹⁰. Hal ini menengarai bahwa proporsi sesungguhnya di Indonesia sebenarnya bisa lebih tinggi.

Masyarakat adat dapat mengalami eksklusi karena keterpencilan geografis, diskriminasi, kurangnya informasi yang tepat dan dapat diakses; dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, atau kombinasi dari berbagai faktor-faktor ini.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperkirakan bahwa 20 persen penduduk Indonesia (sekitar 70 juta jiwa) dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat adat.¹¹ Pada tahun 2012, Kementerian Sosial mencatat masyarakat adat hidup tersebar/terdapat di 24 provinsi, pada 263 kabupaten di 2.304 desa.¹² BPS mencatat terdapat 1.340 kelompok etnis di seluruh Indonesia, dan memperkirakan bahwa antara 50 dan 70 juta orang hidup di kawasan hutan.¹³

GESI dan Pelayanan Dasar

Persoalan gender dalam kaitannya dengan pelayanan dasar, khususnya yang menjadi fokus KOMPAK (kesehatan, pendidikan, identitas hukum) cenderung dikonseptualisasi dari segi akses perempuan terhadap layanan tersebut, baik dari sisi perempuan sebagai pengguna layanan individual, maupun karena kecenderungan peran dominan perempuan dalam mengakses pelayanan untuk anak-anak mereka. Tampaknya hanya sedikit perhatian yang diberikan pada peran perempuan sebagai penyedia layanan atau dalam penyelenggaraan layanan publik.

RJPMN memiliki sejumlah target yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu di Indonesia (kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) diperkirakan sebesar 126.¹⁴ Meskipun angka ini sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masih berada di atas target penurunan SDG sebesar 70 pada akhir 2030¹⁵, dan masih lebih tinggi daripada banyak negara tetangga. Angka kematian anak di bawah lima tahun di Indonesia adalah sebesar 29 per 1.000 kelahiran hidup



Gambar 2. Penelitian oleh Puskapa UI pada tahun 2016 menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas berisiko dua kali lebih besar tidak memiliki akte kelahiran—penyangkalan hak mereka atas identitas hukum.

⁸ Colbran N (2010) Access to Justice for Persons with Disabilities in Indonesia. Australia Indonesia Partnership for Justice/Australian Aid: Jakarta.

⁹ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010.

¹⁰ WHO & World Bank, 2011. World Report on Disability, hal. 29.

¹¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2016. AMAN tagih pemerintah sahkan RUU Masyarakat Adat dan Satgas Masyarakat Adat: <http://www.aman.or.id/2016/12/16/siaran-pers-aman-tagih-pemerintah-sahkan-ruu-masyarakat-adat-dan-satgas-masyarakat-adat/>

¹² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. hal.16.

¹³ Badan Pusat Statistik. Sensus Penduduk, 2010.

¹⁴ WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division (2015) *Trends in Maternal Mortality 1990 to 2015: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division*. Geneva: WHO. <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-3-good-health-well-being>

¹⁵ UNICEF, WHO, World Bank, United Nations (2015) Trends in Child Mortality Report 2014 Estimates Developed by the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation, New York: UNICEF

juga tinggi dalam kawasan regional¹⁶. Analisis oleh UNICEF menyatakan bahwa angka kematian ibu dan anak berhubungan dengan kemiskinan, letak geografis (paling buruk di provinsi-provinsi timur) dan tingkat pendidikan ibu. Analisis tersebut juga menyimpulkan bahwa buruknya kualitas pelayanan kesehatan pada saat kehamilan, persalinan dan pasca kelahiran menjadi kendala utama dalam upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak, lebih daripada keterjangkauan pelayanan.¹⁷

Kesenjangan gender di Indonesia telah berkurang dalam hal kepesertaan pendidikan. Data dari BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa hampir semua (98,82 persen) anak laki-laki dan perempuan (99,02 persen) berusia 7-12 tahun bersekolah. Untuk kelompok usia 13-15 tahun, 95,27 persen anak perempuan dan 93,66 anak laki-laki tercatat bersekolah, dan polanya hanya bervariasi sedikit untuk semua kelompok umur sampai usia 24 tahun¹⁸. Efek ketidaksetaraan sebelumnya, terutama dari segi akses perempuan terhadap pendidikan, masih terasa di kelompok usia yang lebih tua. Sebagai contoh, data Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa 66 persen kepala rumah tangga perempuan dan 51 persen kepala rumah tangga laki-laki tidak memiliki pendidikan, atau berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Data Susenas (2012) tentang penyandang disabilitas menunjukkan bahwa hanya 50 persen anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah.

Seperti disebutkan di atas, banyak masyarakat adat di Indonesia yang tinggal di daerah sangat terpencil. Mereka memiliki hubungan yang terbatas atau memilih untuk tidak memiliki hubungan/relasi dengan masyarakat luar, yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan yang menjadi hak mereka. Ada pula kaitan intrinsik antara eksklusi sosial, ketidaksetaraan kesempatan dan identitas hukum. Berdasarkan data gabungan terkini yang dikumpulkan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) pada tahun 2015, hanya 56 persen anak-anak Indonesia di bawah usia 18 tahun memiliki akta kelahiran.¹⁹ Bank Dunia menyatakan bahwa kepemilikan identitas hukum oleh semua warga negara akan berkontribusi pada 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), termasuk untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap sumber daya ekonomi, mengakhiri kematian bayi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan bagi anak-anak²⁰.

Studi Dasar Identitas Hukum (*Baseline Study of Legal Identity*)²¹ Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menyatakan bahwa dalam 30 persen rumah tangga termiskin Indonesia, 71 persen anak-anak di bawah usia satu tahun tidak memiliki akta kelahiran, 58 persen anak-anak berusia 1-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran, dan 88 persen orang dewasa 18 tahun ke atas tidak memiliki akta kelahiran. Studi ini menemukan bahwa anak-anak dengan orang tua atau wali yang tidak memiliki disabilitas fisik yang nyata lima kali lebih mungkin untuk memiliki akta kelahiran bila dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki orang tua dengan disabilitas fisik yang nyata. Terdapat juga keterkaitan antara tidak adanya akta kelahiran dan pernikahan dini anak perempuan, dan kepemilikan akta kelahiran dengan pencapaian pendidikan dan akses ke pelayanan kesehatan.

GESI dan Tata Kelola Desa

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan dasar hukum bagi desa-desa untuk menentukan dan mengelola pembangunan mereka sendiri serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun, terdapat indikasi bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas masing-masing terbatas partisipasinya dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan desa.

Data dari Pendataan Potensi Desa (PODES) 2014²² menunjukkan bahwa 4.485 dari 78.736 kepala desa dan kecamatan di 34 provinsi di Indonesia adalah perempuan (5,7 persen). Proporsi sekretaris desa dan kecamatan yang perempuan lebih

¹⁶ UNICEF, WHO, World Bank, United Nations (2015) Trends in Child Mortality Report 2014 Estimates Developed by the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation, New York: UNICEF

¹⁷ Op.Cit. catatan kaki 18.

¹⁸ BPS. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah 1, 2002-2014 (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1533>). Dicatat bahwa partisipasi pendidikan, pendaftaran, dan tingkat penyelesaian resmi mungkin belum mencerminkan kehadiran sekolah biasa secara akurat.

¹⁹ Civil Registration and Vital Statistics and Social Protection Program Policy Brief, 2016. Australian Aid, Bappenas, PUSKAPA UI and KOMPAK. Halaman 2.

²⁰ Dunning, C., Gelb, A., & Raghavan, S. (2014). Birth registration, legal identity, and the post-2015 agenda. Center for Global Development Policy Paper. Washington DC: CGD.

²¹ Sumner C, Kusmaningrum S (2014) Indonesia's Missing Millions: AIPJ Baseline Study on Legal Identity. DFAT (Australian Aid, PEKKA and PUSKAPA UI

²² Sumber: Tabel 12.2 Jumlah Desa/Kecamatan menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Camat dan Sekretaris Desa/Sekretaris Kecamatan, BPS (2014) Statistik Potensi Desa Indonesia 2014, BPS: Jakarta. Perhatikan bahwa ada inkonsistensi antara ringkasan yang diterbitkan ini dan data mentah yang dapat diakses oleh KOMPAK. Data yang diterbitkan telah digunakan untuk konsistensi internal.

tinggi, meskipun masih sangat rendah (7.156 dari 70.780 atau 10,1 persen). Survei yang dilakukan oleh PEKKA²³ menemukan bahwa lebih dari sepertiga responden merasa bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan utama yang disebut adalah keyakinan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk itu (77 persen). Berdasarkan peraturan nasional Nomor 110 tahun 2016 baru tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)²⁴ yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi musyawarah desa tentang pembangunan dan pengawasan desa atas penggunaan dana, BPD diharuskan untuk memiliki setidaknya satu wakil perempuan. Namun, sebagai contoh, penelitian lapangan KOMPAK hanya menemukan 1 desa dari 33 di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki wakil perempuan di BPD. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat baik untuk perempuan maupun laki-laki di daerah yang disurvei ditemukan masih rendah, terutama dalam proses Musrembang dan BPD.

Studi *Reality Check Approach* yang ditugaskan KOMPAK dan Knowledge Sector Initiative tentang Perspektif dan Pengalaman Pejabat Pemerintah Desa tentang Undang-undang Desa Baru (*Perspectives and Experience of Village Government Officials on the New Village Law*) (2016) menemukan bahwa perubahan bentang kepemimpinan dapat membuka peluang bagi perempuan dan orang-orang muda karena peran kepemimpinan menjadi semakin tidak menarik bagi generasi tua.

Pembelajaran yang didapat dari PNPM menunjukkan bahwa walaupun tindakan afirmatif dapat meningkatkan partisipasi perempuan, hal ini tidak serta merta akan menghasilkan pergeseran peran perempuan di desa, kendali atas aset, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan, karena 75 persen keterlibatan mereka masih dalam cara pasif (hanya mendengarkan).²⁵ Selain itu, studi Akatiga pada kelompok minoritas dalam PNPM menunjukkan bahwa kelompok yang terpinggirkan/tereksklusi menghadapi sejumlah hambatan untuk dapat terlibat efektif dalam proses-proses yang dipimpin oleh masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan lokasi geografis yang terpencil, kurangnya waktu dan sumber daya yang tersedia untuk menghadiri pertemuan masyarakat, kurangnya informasi, dan dalam beberapa hal karena adanya diskriminasi.²⁶

GESI, Pekerjaan di Luar Sektor Pertanian dan Peluang Pembangunan Ekonomi

Saat ini jumlah tenaga kerja perempuan pada sektor formal semakin besar di Indonesia, tetapi partisipasi angkatan kerja perempuan tetap jauh di bawah laki-laki²⁷ dan masih terdapat kesenjangan upah atas dasar identitas gender yang besar²⁸. Analisis sebelumnya oleh UNESCAP menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 10 persen akan meningkatkan laju pertumbuhan PDB sebesar 0,32 poin persentase²⁹. Meskipun demikian, dan terlepas dari fokus pemberdayaan dan kesetaraan gender perempuan dalam RPJMN, hanya ada sedikit contoh inisiatif spesifik untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, dan hal ini jarang menjadi prioritas yang dinyatakan dalam program yang relevan di sektor ini. Peluang dan minat perempuan untuk memasuki kerja pada sektor formal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk stereotip dan hambatan sosial dan budaya, kondisi kerja, dan kesulitan dalam menyeimbangkan peran ganda mereka. Perempuan mendominasi sektor informal dalam pertanian dan pekerjaan industri rumahan yang fleksibel namun dengan risiko lebih tinggi.

Bagi orang tua pekerja yang miskin di Indonesia, secara tradisional mereka biasanya bergantung pada dukungan keluarga besar untuk mengasuh anak atau memilih pekerjaan informal yang akan memungkinkan mereka membawa anak-anak mereka.³⁰ Namun, perkembangan pesat urbanisasi dalam dua dekade terakhir telah melemahkan sistem dukungan ini ketika keluarga muda mulai mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar desa mereka. Untuk menjawab kebutuhan layanan pengasuhan anak, keluarga kelas menengah perkotaan semakin mengandalkan tempat penitipan anak komersial.

²³ Sistem Pemantauan Kemiskinan Berbasis Komunitas, (SPKBK). Survei dilakukan terhadap 89.960 keluarga (metode sensus) di 111 desa, di 35 kecamatan di 17 provinsi di mana PEKKA bekerja. Pengumpulan data diselesaikan pada tahun 2012.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa No.110/2016.

²⁵ Gibson, C., dan Woolcock, M dalam Voss, J. (2008). *PNPM-Rural Baseline Project*. Jakarta: The World Bank.

²⁶ AKATIGA (2012). *Kelompok Marjinal dalam PNPM*. Jakarta: The World Bank.

²⁷ 51 persen perempuan dibandingkan 84 persen laki-laki (data 2014) lihat <http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS/> <http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS>

²⁸ Tinjauan rinci atas data yang tersedia dari tahun 2010 menyimpulkan bahwa rata-rata, upah perempuan sebenarnya 30,8 persen lebih rendah dari laki-laki, dan bahwa kesenjangan terdapat pada semua kelompok umur (Taniguchi dan Tuwo, 2014; 33).

²⁹ UNESCAP, 2007. *Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2007: Surging Ahead in Uncertain Times*. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. The United Nations, New York. p105

³⁰ Sushil, J. Connel & J. Burgess. 2016. *Flexible Work Organizations: The Challenges of Capacity Building in Asia*. Springer: New Delhi.

Namun bagi keluarga yang tinggal di daerah yang lebih miskin, layanan semacam ini sangat terbatas dan seringkali biayanya tidak terjangkau.³¹ Penelitian menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan laki-laki, peningkatan pendapatan perempuan memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan keluarga.³² Fakta ini mendukung argumen bahwa fokus pada pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial perempuan melalui penyediaan layanan pengasuhan anak yang dapat membebaskan dirinya untuk membuat pilihan yang berbeda merupakan hal yang penting.



Gambar 3. Perempuan Papua di pasar tradisional. Kegiatan ekonomi lokal memainkan peran strategis baik dalam mata pencaharian yang berkelanjutan maupun untuk memperkuat struktur sosial antara berbagai suku dalam masyarakat adat.

Data sensus nasional menunjukkan bahwa ketidakaktifan dalam angkatan kerja bagi para penyandang disabilitas adalah sebesar 29 persen, dibandingkan dengan 9 persen bagi orang-orang tanpa disabilitas. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa 80 persen dari 470 juta penyandang disabilitas di usia produktif yang tinggal di negara-negara berkembang menganggur.³³ Mereka menghadapi berbagai hambatan, termasuk sikap negatif, akses terbatas ke pelatihan, informasi dan infrastruktur. Berkenaan dengan hal tersebut CBM menyatakan bahwa mengembangkan budaya kerja dan lingkungan yang inklusif penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.³⁴

³¹ Yulealawati. (2016). *Current Situation of Early Childhood Education in Indonesia*. Ministry of Education and Culture (MOEC): Jakarta.

BAPPENAS (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Hal. 16.

³² Scanlon, M, et al. 2012. *PNPM Gender Study 2012: Increasing the Quality of Women's Participation Final Report*. Jakarta: PNPM Support Facility, The World Bank.

³³ ILO (2007). *The employment situation of people with disabilities: towards improved statistical information*. Geneva: International Labour Organization.

³⁴ CBM (2013). *Inklusi itu mudah: inklusi disabilitas-mata pencaharian*

3. Kerangka GESI KOMPAK

3.1. Pendekatan dan Fokus

KOMPAK mengadopsi pendekatan jalur ganda untuk gender dan inklusi sosial, yakni:

- **Pengarusutamaan GESI:** Ini bertujuan untuk memastikan bahwa GESI merupakan bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian.
- **Inisiatif terfokus GESI:** Ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan tertentu, mengidentifikasi dan menguji strategi yang efektif untuk direplikasi, atau memberikan rekomendasi bagi pengembangan program di masa mendatang.

Tujuan strategi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan mekanisme untuk mengintegrasikan GESI ke dalam intervensi KOMPAK, melalui pendekatan jalur ganda (sepaimana dapat dilihat di bawah ini). Tabel 2 memaparkan fokus utama dalam kaitannya dengan masing-masing capaian program.

Tabel 2. Strategi GESI dalam Kaitannya dengan Capaian Akhir KOMPAK

Capaian Akhir Fasilitas (End of Facility Outcome)	Fokus Intervensi
Capaian 1. Pemerintah daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan terhadap pelayanan dasar.	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan dukungan terhadap kebijakan mencakup analisis dan rekomendasi terkait GESI pada bagian-bagian yang relevan• Memfasilitasi keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas terpinggirkan lainnya dalam kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah.• Meningkatkan perhatian terhadap pemahaman dan memenuhi kebutuhan data terpilah, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya untuk kebutuhan perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan pelayanan dasar.
Capaian 2. Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan dukungan terhadap kebijakan mencakup analisis dan rekomendasi terkait GESI pada bagian-bagian yang relevan• Meningkatkan perhatian terhadap pemahaman dan memenuhi kebutuhan data terpilah, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan desa.• Meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan etnik minoritas dalam proses pembangunan desa.
Capaian 3. Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari perluasan kesempatan kerja (di sektor non-pertanian) dan pengembangan ekonomi produktif.	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan dukungan terhadap kebijakan mencakup analisis dan rekomendasi terkait GESI pada bagian-bagian yang relevan.• Meningkatkan perhatian pada akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan, penyandang disabilitas dan etnik minoritas dalam kebijakan dan program pemerintah yang relevan• Mengidentifikasi dan menguji strategi atau model untuk meningkatkan peluang ekonomi, termasuk inklusi keuangan, untuk perempuan dan penyandang disabilitas

3.2. Teori Perubahan GESI

Teori Perubahan GESI KOMPAK erat kaitannya dengan teori perubahan umum KOMPAK, dan terangkum sebagaimana berikut ini:

- JIKA formula kebijakan transfer fiskal dan alokasi anggaran lebih jelas, memperhitungkan keragaman lokal, DAN dipahami lebih baik--MAKA aliran dana ke pemerintah daerah dan unit pelayanan daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya.

- JIKA pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dapat lebih baik memahami kebutuhan kelompok miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan DAN didukung dengan adanya pengawasan dan fasilitasi--MAKA akan semakin banyak dana yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan pembangunan desa yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan.
- JIKA ada peningkatan dalam keterlibatan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan atau rentan lainnya dan lembaga-lembaga pendukung seperti organisasi masyarakat sipil dalam musyawarah desa, pengambilan keputusan dan perencanaan--MAKA keputusan dan rencana desa akan lebih akuntabel terhadap kebutuhan dan kepentingan populasi ini.
- JIKA KOMPAK memfasilitasi identifikasi dan pengumpulan data untuk berbagai pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya, DAN dapat mengidentifikasi sosok pemimpin berpengaruh yang relevan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil--MAKA inisiatif-inisiatif seperti ini akan dilaksanakan dan, seiring waktu memberi manfaat luas kepada kelompok-kelompok tersebut. Berbagai inisiatif ini dapat terkait dengan model pelayanan, kewirausahaan berbasis masyarakat, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Teori Perubahan ini bergantung pada tiga strategi inti:

- Meningkatkan **akses** pemerintahan desa ke pemerintah nasional dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan **pemahaman serta penggunaan informasi** yang relevan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan.
- **Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan, khususnya pada perempuan**, untuk mengambil peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dengan penekanan pada proses pembangunan desa. Termasuk keterlibatan proaktif dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang relevan, seperti organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan organisasi yang fokus pada perempuan dan gender.
- **Meningkatkan perhatian pada GESI dalam kebijakan pemerintah**, baik dalam isi kebijakan maupun proses pengembangan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kedua poin sebelumnya, dengan asumsi bahwa informasi yang lebih baik akan membuat argumen-argumen yang lebih meyakinkan, dan kemampuan partisipasi yang lebih baik akan membuat suara yang beragam lebih didengar.

Asumsi

Delapan asumsi inti yang melandasi cara kerja KOMPAK dan beberapa prioritas telah diidentifikasi dan disempurnakan. Asumsi-asumsi ini akan diuji melalui sistem penilaian kinerja KOMPAK. Beberapa pertimbangan khusus GESI terkait dengan asumsi-asumsi inti yang relevan adalah:

- 1 KOMPAK akan dapat mengidentifikasi dan mendukung agen-agen perubahan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil
Fokus GESI: KOMPAK akan dapat mengidentifikasi dan mendukung agen perubahan yang berfokus pada GESI.
- 2 Investasi KOMPAK dalam menjaga hubungan dengan berbagai mitra pembangunan akan mendorong keterlibatan produktif dalam perubahan kebijakan dan praktik
Fokus GESI: Hubungan yang kuat akan memungkinkan diskusi yang lebih terbuka tentang bagaimana mengintegrasikan GESI yang pada kondisi/situasi tertentu mungkin masih sulit diterima

- 3 Perubahan kebijakan akan mendorong perubahan perilaku (dalam hal ini kebijakan didefinisikan secara luas dari legislasi ke peraturan lokal dan pedoman, dan perubahan perilaku, termasuk kinerja staf dan perubahan dalam melakukan perencanaan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan pembangunan)
Fokus GESI: Memasukan ketentuan khusus terkait GESI dalam kebijakan akan mendorong perubahan perilaku – atau membuka jalan untuk advokasi implementasi kebijakan (yaitu, jika ada dalam kebijakan atau legislasi, OMS dan pihak-pihak lain dapat mendorong agar hal itu dilakukan).
- 4 Pemerintah Indonesia (dari tingkat desa sampai nasional) dan pelaku lainnya akan menggunakan informasi (data, penelitian, praktik yang baik) untuk membuat keputusan terkait pelayanan dasar dan pembangunan desa.
Fokus GESI: Tersedianya lebih banyak data terpilah dan analisis yang baik, akan mendorong perhatian yang lebih besar terhadap GESI
- 7 Partisipasi yang lebih besar atau lebih beragam dalam diskusi dan pengambilan keputusan akan menghasilkan perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih akuntabel.
Fokus GESI: Ini termasuk perhatian khusus pada partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya atau perwakilannya (seperti organisasi penyandang disabilitas atau OMS lainnya)
- 8 Pelayanan yang lebih baik akan menghasilkan penyerapan layanan yang lebih besar oleh pengguna layanan
Fokus GESI: Jika pelayanan lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya, penyerapan layanan oleh kelompok-kelompok ini akan lebih meningkat.

3.3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi GESI dalam KOMPAK akan ada dalam dua bentuk:

- **Pemantauan khusus atas komitmen terhadap strategi ini**

Hal ini akan dilakukan secara terus-menerus oleh Manajer Gender dan Inklusi KOMPAK. Setiap persoalan akan dibahas dengan Tim Pengelola Proyek pada tingkat senior dan melalui proses peninjauan setiap tiga bulan yang diterapkan di KOMPAK secara umum.

Untuk memfasilitasi ini, KOMPAK telah mengembangkan Daftar Periksa GESI (Lampiran 3). Daftar periksa ini digunakan oleh tim untuk menilai seberapa sensitif gender dan inklusif, proyek-proyek dan sistem telah dikembangkan, dan untuk mengidentifikasi tindakan khusus yang dibutuhkan untuk memperkuat GESI dalam berbagai kegiatan, sistem dan proses di KOMPAK. Ini adalah perangkat partisipatif yang mendorong tim untuk berdiskusi tentang apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Setiap anggota tim atau anggota staf dari organisasi mitra dapat memimpin diskusi dengan melibatkan tim dan Manajer GESI menggunakan Daftar Periksa ini. Berdasarkan temuan dari diskusi tersebut, tim proyek mengembangkan sebuah Rencana Aksi GESI yang kemudian ditinjau kembali setiap tiga bulan.

- **Kompilasi dan analisis data dan informasi yang dikumpulkan melalui kerangka penilaian kinerja KOMPAK**

KOMPAK has ensured that the over-arching performance management system is GESI sensitive, with the main elements outlined in the following table.

Tabel 3. Kerangka Penilaian Kinerja GESI KOMPAK

Alat atau Proses Penilaian Kinerja	Perhatian terhadap GESI	Indikator Terkait
#1 Studi Dasar	<p>Survei tingkat rumah tangga yang memungkinkan analisis terpilah. Pertanyaan khusus terkait partisipasi dalam berbagai proses pada tingkat desa dan pengalaman mengakses layanan.</p> <p>Analisis rencana desa mencakup analisis alokasi untuk kegiatan terkait GESI.</p> <p>Analisis sumber data sekunder (PODES, Susenas) meliputi indikator GESI yang relevan.</p>	<p>KOMPAK #2. Jumlah dan proporsi desa di mana kelompok miskin dan rentan menyatakan bahwa mereka telah mampu mengakses beberapa pelayanan dasar sesuai kebutuhan mereka.</p> <p>KOMPAK #8: Jumlah dan proporsi sampel laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh struktur pemerintahan desa sudah tanggap terhadap kebutuhan mereka</p> <p>KOMPAK #11A. Jumlah dan proporsi rencana desa yang mencakup pendanaan untuk penyelenggaraan dan/atau akses ke pelayanan dasar, atau mengatasi ketidaksetaraan lainnya</p> <p>KOMPAK #11B. Proporsi dana desa (i) dialokasikan, dan (ii) dibelanjakan untuk pelayanan dasar tertentu atau untuk mengatasi ketidaksetaraan lainnya sesuai rencana desa</p>
#2 Keterlibatan dalam kajian kebijakan internal kelembagaan	<p>Proses mencakup pertanyaan spesifik tentang apakah dukungan kajian kebijakan sudah mencakup perhatian terhadap GESI, dengan pertimbangan pada isi saran kebijakan maupun proses reformasi. Rekomendasi untuk memperkuat perhatian pada GESI dimasukkan dalam dokumentasi kajian yang diketahui dengan tim.</p> <p>Setelah menyelesaikan perumusan kebijakan, analisis terhadap kebijakan yang dihasilkan atas dukungan KOMPAK mencakup perhatian pada integrasi GESI pada bagian-bagian yang relevan.</p> <p>Data tentang partisipasi dalam proses memengaruhi kebijakan (lihat di bawah) dikompilasi dengan kajian kebijakan.</p>	<p>KOMPAK #0/DFAT: Jumlah contoh di mana dukungan Pemerintah Australia (KOMPAK) menghasilkan perbaikan kebijakan. Mencakup analisis lebih lanjut tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan contoh kebijakan yang dikembangkan atau dimodifikasi di mana terdapat pelibatan perwakilan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok terpinggirkan lainnya (seperti advokat, aktivis dan OMS/OPD). Jumlah dan contoh kebijakan yang dirumuskan berdasarkan informasi data terpilah yang didukung oleh KOMPAK (seperti penelitian, ringkasan kebijakan, makalah akademik). Jumlah dan contoh kebijakan yang mencakup teks/kalimat spesifik terkait GESI berdasarkan masukan KOMPAK.

Tabel 3. Kerangka Penilaian Kinerja GESI KOMPAK (lanjutan)

Alat atau Proses Penilaian Kinerja	Perhatian terhadap GESI	Indikator Terkait
#3 Laporan Pasca Kegiatan	Termasuk kebutuhan untuk mencakup data jumlah peserta perempuan dan laki-laki	Indikator PAF DFAT: Jumlah perempuan dan laki-laki di penyedia layanan yang menggunakan keterampilan teknis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.
#4 Survei Penilaian Peserta dan Tindak Lanjut		Indikator PAF DFAT: Jumlah orang, terutama perempuan dan kelompok terpinggirkan, yang berpartisipasi dalam kegiatan untuk memengaruhi kebijakan
#5 Cerita Perubahan atau Tidak Ada Perubahan	Menanyakan secara khusus jika cerita menggambarkan perubahan yang memberi manfaat langsung bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok sangat miskin, atau kelompok terpinggirkan lainnya. Mencakup pemberian tanda terhadap asumsi yang tercantum dalam bagian 0	Untuk indikator berikut, akan ada perhatian khusus pada persepsi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • KOMPAK #9: Persepsi masyarakat tentang perubahan dalam tata kelola desa dan pelayanan dasar • KOMPAK #13A: Contoh perubahan dalam pelibatan masyarakat dan pengaruh dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. • KOMPAK #14: Contoh inisiatif untuk meningkatkan keterwakilan dalam struktur pemerintahan desa di kecamatan/desa sasaran
#6 Pemindaian/identifikasi Kabupaten/Kecamatan	Menanyakan apakah sudah ada upaya untuk meningkatkan keragaman atau keterwakilan dalam proses dan struktur pengambilan keputusan Mengidentifikasi jika sudah ada contoh informasi atau bukti yang digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan	Berpotensi mengidentifikasi contoh yang relevan dengan berbagai indikator : <ul style="list-style-type: none"> • KOMPAK #7: Contoh koordinasi, pertukaran informasi, atau advokasi, antara (manapun) kecamatan, pelayanan dasar tertentu, dan desa-desa yang digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar atau perencanaan dan penganggaran desa (dengan memperhatikan perbaikan/ peningkatan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan 15 kelompok terpinggirkan lainnya) • KOMPAK # 14 (lihat di atas)

4. Kelompok Sasaran dan Mitra

Melalui kemitraan, KOMPAK hendak menjangkau dan bekerja dengan: perempuan kepala rumah tangga; pemuda dan anak-anak rentan; penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok minoritas adat/etnis. Untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan tersebut KOMPAK bermitra dengan beberapa organisasi, program dan lembaga pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. Mitra-Mitra Strategis KOMPAK

Nama Organisasi	Gambaran Kerjasama
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	KOMPAK mendukung program pelatihan <i>Akademi Paradigta</i> PEKKA yang memperkuat kapasitas kader perempuan untuk terlibat secara lebih efektif dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perencanaan dan pengembangan desa yang inklusif dan berbasis data. <i>Akademi Paradigta</i> menyelenggarakan kelas dan pembinaan berbasis lapangan untuk perempuan kepala rumah tangga dan anggota kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Antara tahun 2015 dan 2016, 470 kader perempuan di 7 provinsi sudah dilatih. Keberhasilan yang sejauh ini dicapai, antara lain: para kader perempuan ini mulai bekerja sebagai staf pemerintah desa; adanya peningkatan permintaan dari pemerintah desa agar para kader perempuan ini ikut mendukung pengembangan peraturan desa. Di satu lokasi, peraturan daerah mengalokasikan dana untuk pelatihan kader perempuan dan terdapat sejumlah dana desa yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini dimasa depan. Atas permintaan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, KOMPAK akan mendukung PEKKA untuk menyelenggarakan forum pembelajaran reguler untuk staf Kementerian Desa untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari praktik dalam pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kesetaraan gender. Selain itu, studi dan hasil analisis akan dikemas sebagai materi dialog kebijakan dan untuk memberikan pengaruh di tingkat nasional.
Institute for Research and Empowerment (IRE)	KOMPAK mendukung konsorsium OMS nasional di bawah Institute of Research and Empowerment (IRE) untuk menguji dan mengembangkan praktik baik untuk mempromosikan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa. Pada tahun 2017, kegiatan dan perangkat yang dikembangkan akan langsung menasar persoalan yang dihadapi perempuan dan kelompok terpinggirkan dengan fokus pada proses musyawarah desa di mana keputusan tentang penggunaan dana desa diambil dan pengawasan dilakukan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel.
The Asia Foundation (TAF)	KOMPAK mendukung konsorsium OMS nasional di bawah TAF untuk menguji dan mengembangkan praktik yang baik dalam mempromosikan akuntabilitas sosial dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan). Kegiatan dan perangkat yang dikembangkan berfokus untuk menjangkau perempuan, penyandang disabilitas dan juga akan masyarakat adat di beberapa lokasi sasaran.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA)	KOMPAK mendukung Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/SEKNAS FITRA untuk memperkuat BPD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran; dan mendukung Kementerian Desa untuk meningkatkan pelayanan pengaduan khususnya terkait dengan penganggaran desa.
Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA UI) Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)	KOMPAK mendukung PUSKAPA UI dan LPA NTB untuk meningkatkan system catatan kependudukan dan statistik vital Indonesia dalam konteks desentralisasi dan pelayanan dasar yang tersedia secara lokal (terutama kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial). Rancangan program mencakup pendekatan komprehensif lima tahun, yang berfokus untuk menyediakan layanan pencatatan sipil lebih dekat kepada masyarakat agar dapat: menjangkau perempuan dan kelompok paling rentan; memfasilitasi proses pencatatan sipil melalui pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)	KOMPAK mendukung BaKTI untuk melaksanakan LANDASAN Tahap II di Papua dan Papua Barat yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan dasar untuk sekitar 12 suku Papua di 24 kampung adat. Inti pekerjaan ini adalah merancang dan menyelenggarakan kegiatan khusus untuk perempuan, pemimpin perempuan dan masyarakat adat berdasarkan prioritas persoalan dan hambatan spesifik yang mereka hadapi dalam proses pembangunan desa dan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

KOMPAK mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dan perluasan kesempatan ekonomi bagi perempuan miskin dan kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan. Hal ini akan dicapai melalui: perintisan layanan dasar, keterlibatan pemerintah di beberapa lokasi dengan kegiatan mitra strategis, dan berbagi praktik baik pada tingkat lokal di berbagai wilayah proyek. KOMPAK mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPENAS dalam meningkatkan peluang ekonomi bagi penyandang disabilitas; perempuan dan masyarakat desa melalui program literasi keuangan inklusif dan *Roadshow* BUMDesa di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat untuk mempromosikan pendekatan inklusif dalam pembangunan ekonomi desa.

Lima kementerian mitra utama KOMPAK adalah:

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementeaian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kementerian Keuangan

Memanfaatkan Investasi Pemerintah Australia

KOMPAK bekerja secara kolaboratif dengan sejumlah investasi Pemerintah Australia lainnya untuk membangun sinergi dan meningkatkan dampak investasi Pemerintah Australia secara lebih menyeluruh dalam kesetaraan gender dan inklusi sosial di Indonesia. Lintas kolaborasi berfokus pada capaian dan praktik dan bidang kerjasama prioritas dengan investasi Pemerintah Australia lainnya mencakup:

Tabel 5. Mitra Pemanfaatan Investasi Pemerintah Australia melalui KOMPAK

Proyek Investasi Pemerintah Australia	Deskripsi Kerja Sama
MAMPU	KOMPAK melibatkan mitra MAMPU untuk belajar dari praktik-praktik baik yang dihasilkan dan memanfaatkan jaringan dan hasil yang telah dicapai. Pada tahun 2016, MAMPU dan KOMPAK bermitra untuk melakukan penelitian tentang pengasuhan anak untuk mendukung perempuan dalam bekerja. Pada tahun 2017, KOMPAK berencana melibatkan MAMPU untuk menyelenggarakan pembelajaran dan praktik baik dalam bermitra dengan OMS terutama di Papua dan Papua Barat untuk peningkatan layanan bagi masyarakat adat, terutama perempuan.
PEDULI	PEDULI bekerja melalui OMS nasional dan lokal, dan bekerja dengan enam kelompok utama yang sering terpinggirkan. Melalui kerja akuntabilitas sosial dengan TAF, KOMPAK meningkatkan jejaring dan praktik yang baik dari mitra Peduli untuk menguji berbagai perangkat dan pendekatan yang dapat meningkatkan akses perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan ke pelayanan dasar, dan mendukung keterlibatan dengan pemerintah daerah dan unit-unit layanan lokal terkait penyelenggaraan layanan dasar. Pada tahun 2017, melalui kemitraan OMS untuk transparansi anggaran, KOMPAK akan memanfaatkan praktik baik dan lebih lanjut mengembangkan kegiatan khusus yang diujicobakan dalam program PEDULI DESA.
AIPJ	Pada tahun 2017, KOMPAK akan berkolaborasi dengan AIPJ melalui Program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) untuk mendukung PKK dan Karang Taruna dalam pengawasan Dana Desa. Memanfaatkan permainan baru yang disebut TRATA (Transparan, Akuntabel, Tepat Guna), KOMPAK akan mendukung AIPJ dalam penyelenggaraan kampanye 'Jaga Desa' melalui Tim Pemerintah Sub-Nasional KOMPAK di 7 provinsi: Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat Tenggara, Papua dan Papua Barat.

5. Proses, Budaya Kerja dan Kelembagaan KOMPAK

KOMPAK mengakui bahwa proses-proses kelembagaan, termasuk komposisi/profil staf, dapat mendorong dan memperkuat perhatian terhadap GESI. KOMPAK akan terus berusaha untuk meningkatkan keragaman staf dan mendorong adanya keterwakilan penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya, serta menerapkan sistem dan prosedur internal sebagai berikut:

Strategi dan Program

- Mengintegrasikan perspektif GESI ke dalam strategi, rencana, kerangka acuan, dan kebijakan operasional.
- Memasukkan GESI ke dalam rancangan dan rencana kegiatan kunci dengan pemerintah dan mitra OMS, serta dengan memastikan adanya kegiatan orientasi GESI untuk rekan-rekan utama.
- Menghasilkan dan menganalisis data yang relevan dengan GESI secara terpilah relevan, mewajibkan hal ini dilakukan juga oleh mitra dan jaringan kerjanya, dan mendorong hal ini dalam keterlibatan dengan seluruh kementerian mitra kerja.
- Menjunjung tinggi prinsip “suara kita, hak kita”, yang menekankan pentingnya kemitraan dengan, dan mendengarkan suara perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok lainnya yang terpinggirkan.
- Memantau dan melaporkan pelaksanaan strategi GESI ini, baik secara program maupun dalam hal tindakan dan kinerja staf.
- Memantau alokasi dan pengeluaran anggaran untuk kegiatan terkait GESI.
- Mendukung eksperimentasi dan inovasi untuk menciptakan perubahan positif jangka panjang dalam relasi gender dan inklusi sosial yang akan meningkatkan akses perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok lainnya yang terpinggirkan terhadap pelayanan dasar, pembangunan desa, dan peluang ekonomi.

Sumber Daya Manusia

- Memastikan bahwa staf menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan strategi GESI ini, dan memberikan pengembangan keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan peran dan tanggung jawab tersebut terpenuhi. Semua staf baru akan mendapatkan paparan tentang GESI sebagai bagian dari orientasi mereka.
- Menetapkan *focal point* GESI di seluruh tim termasuk: pelaksanaan program, operasional organisasi dan strategi, kinerja dan inovasi, dan perwakilan kantor Jakarta dan propinsi.
- Mempromosikan sikap dan fasilitas yang peka gender dan inklusif.
- Memastikan partisipasi dan keterlibatan yang bermakna penyandang disabilitas dengan memastikan bahwa lokasi kegiatan dapat diakses dan tersedia dukungan khusus, seperti penerjemah bahasa isyarat atau asisten pribadi jika diperlukan.

Komunikasi

- Mempromosikan kegiatan GESI dan pembelajaran melalui situs dan berbagai publikasi KOMPAK.
- Memastikan materi dan publikasi secara positif menggambarkan dan mempromosikan keanekaragaman penduduk Indonesia dari segi usia, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok etnis.
- Mengakui bahwa terkadang lebih baik bekerja secara tidak terlihat daripada menyatakan kegiatan tertentu dikhususkan untuk GESI.
- Meningkatkan aksesibilitas melalui penggunaan piranti lunak *screen-reader* di situs KOMPAK yang memungkinkan penyandang disabilitas netra menavigasi situs dan mengakses informasi.
- Website KOMPAK dirancang untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Isi website juga dapat diakses ‘pembaca layar’ (*screen reader*) yang memungkinkan penyandang disabilitas netra menavigasi situs dan mengakses informasi.
- Menyediakan kartu nama staf yang dilengkapi dengan huruf Braille.

Lampiran

Lampiran 1. Komitmen Kebijakan Indonesia Terkait Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial

Dokumen	Ketentuan
UUD 1945	<p>Pasal 27:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (...)(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. <p>Pasal 28H:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. <p>Pasal 28I:</p> <ol style="list-style-type: none">(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. <p>Pasal 34:</p> <ol style="list-style-type: none">(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW</i>) Ditandatangani oleh Indonesia: 29 Juli 1980 Diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [sic] (CEDAW), 13 Sep 1984	<p>Pasal 14:</p> <ol style="list-style-type: none">(2) Negara-negara Pihak wajib membuat langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:<ol style="list-style-type: none">(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat;(b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;(c) Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka;(e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan;(f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;(g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanian termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;(h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi
Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Instruksi ini mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan: yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dokumen	Ketentuan
UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga	Definisi kekerasan dalam rumah tangga termasuk: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, dan mengkriminalisasi perkosaan dalam pernikahan. Pelecehan seksual dikriminalisasi dan hak-hak korban diakui secara eksplisit.
UU No.40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2011	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Indonesia atas UNCPRD	Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas (<i>United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>) adalah momentum untuk mengubah paradigma dalam penanganan isu disabilitas dari pendekatan medis dan sosial menuju perspektif hak asasi manusia.
Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender	Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan oleh empat kementerian dalam nomor surat yang berbeda sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: 270/M.PPN/11/2012 2. Kementerian Keuangan: SE-33/MK.02/2012 3. Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE 46/MPP-PA/11/2012
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014	Pasal 1, ayat 1: pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskn berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.
UU No. 6/2014 tentang Desa	Bab 2 tentang Kepala Desa pasal 26: demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa Paragraf (4); Pasal 63 ayat b: kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa Penjelasan bagian no.7 tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa.
RPJMN 2015-2019	RPJMN memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
Peraturan Pemerintah No.75/2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Dalam RANHAM ini terdapat kelompok-kelompok rentan termasuk, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat minorits sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan seperti: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup arahan yang sangat jelas bagi semua Kementerian terkait dan sektoral pada tingkat lokal untuk melaksanakan agenda nasional Hak Asasi Manusia ini.
Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap disabilitas, 2015	Pedoman ini dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu disabilitas dalam program/kegiatan perencanaan dan penganggaran mereka.
Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 7/2015	Rencana Startegis tentang Pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM
UU No. 8/2016 tentang Disabilitas	Berdasarkan proses ratifikasi, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan undang-undang baru tentang disabilitas yang terdiri dari 22 hak penyandang disabilitas dan 4 hak tambahan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Lampiran 2. Intervensi GESI 2017-2018

Tujuan Masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar		
Hasil 1 Pemerintah daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan terhadap pelayanan dasar.	Hasil 2 Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.	Hasil 3 Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari perluasan kesempatan kerja (di sektor non-pertanian) dan pengembangan ekonomi produktif.
<p>Proyek 1. Penguatan Kebijakan Dana Transfer Daerah untuk Peningkatan Pelayanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penganggaran yang peka gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa. • Sosialisasi penganggaran yang peka disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. 	<p>Proyek 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Unit Pelayanan untuk Pengelolaan Pelayanan Dasar yang Responsif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulai memasukkan data dan informasi dasar tentang disabilitas ke dalam sistem basis data terpadu. • Mendokumentasikan praktik yang baik dari inisiatif lokal yang mendorong inklusi disabilitas dalam pembangunan daerah. 	<p>Proyek 8. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan UMKM dalam Mengakses Pasar dan Jasa Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perangkat literasi keuangan yang akses bagi penyandang disabilitas. • Memperkenalkan pendekatan yang inklusif dalam kegiatan ekonomi produktif melalui program BUMDesa <i>Expo/Roadshow</i>.
<p>Proyek 3. Peningkatan Sistem Layanan Dasar dan Inovasi Pemerintah Daerah dan Unit Pelayanan untuk Pelayanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isu dan perspektif gender dan inklusi sosial terintegrasi dalam program identitas hukum yang dilaksanakan oleh PUSKAPA UI dan LPA NTB. • Menargetkan perangkat dan kegiatan akuntabilitas sosial memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar untuk kelompok masyarakat yang paling rentan: perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. (The Asia Foundation) 	<p>Proyek 5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Desa untuk Layanan Dasar dan Peluang Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis untuk mengarusutamakan gender dan inklusi sosial pada perencanaan dan penganggaran desa dan sistem data melalui <i>e-learning</i>; aplikasi game dan aplikasi pendamping (Ruang Desa). • Mengintegrasikan materi gender dan inklusi sosial dalam modul pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan kecamatan. 	<p>Project 9. Innovation for technical and vocational education and training centre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rintisan pelatihan kejuruan dan pengembangan keterampilan, bantuan teknis yang sesuai dengan pasar, kepada kelompok paling rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat desa, untuk meningkatkan partisipasi mereka di lima rintisan proyek: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Tujuan
Masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar

Hasil 1	Hasil 2	Hasil 3
Pemerintah daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan terhadap pelayanan dasar.	Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.	Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari perluasan kesempatan kerja (di sektor non-pertanian) dan pengembangan ekonomi produktif.

Proyek 4. LANDASAN Fase II di Papua dan Papua Barat

- Memulai dialog dengan pemerintah, OMS, lembaga perwakilan agama dan masyarakat adat untuk lebih memahami dan membahas isu-isu gender dan inklusi sosial.
- Forum perempuan dan pemuda untuk memperkuat suara mereka dalam perencanaan desa dan mengidentifikasi strategi alternatif untuk lebih mendorong keterwakilan dan proses pembangunan yang inklusif gender.

Proyek 6. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemangku Kepentingan Desa untuk Pembangunan yang Lebih Inklusif dan Pro-poor

- Untuk memastikan peraturan daerah tentang proses BPD dan Musyawarah Desa menciptakan ruang yang cukup untuk partisipasi perempuan dan warga terpinggirkan.
- Memperkuat peran BPD dalam transparansi anggaran dengan fokus pada anggaran desa yang transparan, pro-miskin dan setara gender.

Tujuan

Masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar

Hasil 1

Pemerintah daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan terhadap pelayanan dasar.

Hasil 2

Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Hasil 3

Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari perluasan kesempatan kerja (di sektor non-pertanian) dan pengembangan ekonomi produktif.

Proyek 7. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kelembagaan Desa & Proses Pembangunan

- Mengembangkan perangkat dan kegiatan akuntabilitas sosial untuk pembangunan desa yang dirancang khusus untuk melibatkan dan memberikan manfaat bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan seperti penyandang disabilitas (IRE).
- Akademi Paradigma tahap II yang melatih kader perempuan untuk mendukung masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat proses pembangunan desa yang memberikan manfaat bagi perempuan dan kelompok marjinal. (PEKKA).
- KOMPAK berkolaborasi dengan AIPJ untuk menguji dan memperluas jangkauan keberhasilan penerapan strategi dan penggunaan alat permainan masyarakat untuk mempromosikan akuntabilitas transparansi pemerintah dan unit pelayanan (targetnya adalah perempuan dan pemuda termasuk PKK dan Karang Taruna).

Proyek 10. Inovasi untuk Percepatan Pelayanan Dasar dan Kesempatan Ekonomi

- *Innovation Challenge Fund* (Dana Tantangan Inovasi) akan membuka peluang bagi para inovator untuk mengusulkan solusi terhadap tantangan utama pembangunan dengan fokus pada perempuan dan penyandang disabilitas, juga kelompok marjinal lainnya.

Lampiran 3. Daftar Periksa Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Apa yang dimaksud daftar periksa GESI?

Daftar periksa Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (*Gender Equality and Social Inclusion – GESI*) adalah alat penilaian diri/tim internal KOMPAK untuk menilai seberapa peka gender dan inklusif suatu proyek dan/atau sistem, serta untuk mengidentifikasi tindakan spesifik yang dibutuhkan untuk memperkuat hal tersebut di kegiatan, sistem dan proses yang berjalan di KOMPAK.

Siapa yang menggunakannya?

Daftar periksa ini akan digunakan oleh tim proyek. Ini merupakan alat partisipatif yang mendorong diskusi dalam tim tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Siapa pun anggota tim atau staf organisasi mitra terkait dapat memimpin diskusi dengan tim dan Manajer GESI dengan menggunakan daftar periksa ini yang merupakan bagian dari Manajemen Siklus Proyek di KOMPAK.

Mengapa daftar periksa GESI penting?

Mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial adalah sentral bagi pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Salah satu target kinerja untuk program bantuan Australia adalah untuk memastikan bahwa lebih dari 80 persen investasi, terlepas dari tujuannya, secara efektif menysasar persoalan gender dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, daftar periksa ini penting untuk mencapai dua hal tersebut. Daftar periksa ini akan membantu tim dalam “memeriksa” seberapa peka rancangan proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial. Bagi tim operasional, hal ini akan membantu memeriksa seberapa jauh kesetaraan gender dan inklusi sosial diterapkan dalam sistem, proses dan kebijakan lembaga.

Apa yang kami maksud dengan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial?

Kesetaraan Gender: adalah hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan gender dapat dicapai pada saat perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda sama-sama dihargai dan dipertimbangkan.

Inklusi sosial: adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan dan mengembalikan martabat individu/kelompok yang sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas seperti: gender, disabilitas, suku dan ras minoritas yang menghambat keterlibatan dan peran aktifnya dalam masyarakat. Inklusi sosial dapat membantu dalam mencapai beberapa tujuan pembangunan antara lain: mempromosikan hak-hak universal dan kemampuan; menjamin kebutuhan dasar terpenuhi; mendorong partisipasi penuh; dan mengakui serta menghargai identitas: bebas dari diskriminasi.

Bagaimana menggunakan daftar periksa GESI

Setiap tim Proyek KOMPAK, anda diharuskan untuk mengisi daftar periksa ini melalui langkah-langkah sederhana berikut :

1. Atur waktu dengan tim proyek anda untuk berdiskusi bersama, cetaklah daftar periksa dan tentukan seseorang untuk mencatat jawaban. Ajak Manajer/Penanggung-jawab GESI untuk bergabung.
2. Jawab setiap pertanyaan pada daftar periksa dengan membahas bersama tim dan Manajer/Penanggung-jawab GESI, seberapa baik tim anda telah mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial pada semua tahap siklus proyek. Untuk jawaban ‘ya’ berikan tanda centang pada bagian yang sesuai dan untuk jawab ‘tidak’ biarkan kosong. Untuk pertanyaan dengan jawaban ‘Tidak’ tim dapat membahas lebih lanjut tantangan dan hambatan atau peluang yang teridentifikasi dan mencatat poin-poin utama yang muncul dalam pembahasan.
3. Manajer/Penanggung-jawab GESI kemudian membahas dengan tim, posisi proyek dan berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan penyesuaian untuk mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial baik (pada tingkatan individu, sistemik, formal atau informal).

4. Diskusi ini akan menghasilkan Rencana Aksi yang menguraikan tindakan spesifik yang harus diambil oleh tim untuk meningkatkan kepekaan gender dan inklusi dalam proyek. Tindakan pemeriksaan ini dapat dilakukan secara internal oleh tim, atau oleh Manajer/Penanggung-jawab GESI atau jika diperlukan dapat meminta dukungan seorang ahli untuk melakukan memberikan saran tertentu. Rencana aksi GESI yang dihasilkan secara berkala dikaji ulang dan diperbarui sebagai bagian dari proses Tinjauan Triwulan internal KOMPAK.

Australian Government, Department of Foreign and Trade, Gender equality and women empowerment strategy, February-2016.

Australian Government, Department of Foreign and Trade-Gender Training Manual, 2016.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2016. AMAN tagih pemerintah sahkan RUU Masyarakat Adat dan Satgas Masyarakat Adat:<http://www.aman.or.id/2016/12/16/siaran-pers-aman-tagih-pemerintah-sahkan-ruu-masyarakat-adat-dan-satgas-masyarakat-adat>

Australian Government, Department of Foreign and Trade, Development for all 2015-2019: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program, 2015.

Australian Government, Department of Foreign and Trade, reaching indigenous people in the Australian aid program: guidance note, 2015.

AKATIGA (2012). Kelompok Marjinal dalam PNPM. Jakarta: The World Bank.

Australia-Indonesia Partnership for Justice: gender strategy, December 2011.

Arief, Rezki Lestari. 2008. The effects of growth and change in inequality on poverty reduction in Indonesia. The Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands.

Bappenas (2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [National Medium-term Development Plan, RPJMN] 2015–2019, GOI: Jakarta. p.6.

Bappenas (2016), social protection and poverty reduction in Indonesia: toward comprehensive system, Vivi Yulaswati-Director of Poverty Reduction and Social Welfare, presentation material. p.6.

BAPPENAS (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. P.16.

Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010.

BAPPENAS (2016). Civil Registration and Vital Statistic and Social Protection Program Policy Brief, 2016. Australian Aid, PUSKAPA UI and KOMPAK. Page 2.

CBM (2013). Inklusi itu mudah: inklusi disabilitas-mata pencaharian (2013). CBM-Indonesia.

Colbran N (2010) Access to Justice for Persons with Disabilities in Indonesia. Australia Indonesia Partnership for Justice/ Australian Aid: Jakarta.

Department of Foreign Affairs and Trade-Australian Government, 2016: Gender equality and women's empowerment strategy. p.1.

Department of Foreign Affairs and Trade-Australian Government, 2015: Development for all 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program. p.1.

Dunning, C., Gelb, A., & Raghavan, S. (2014). Birth registration, legal identity, and the post-2015 agenda. Center for Global Development Policy Paper. Washington DC: CGD.

DFID, A theory of change on gender equality & women's and girl's empowerment, PPA Learning Partnership Gender Group, November-2015.

Government of Indonesia (GOI), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [National Medium-term Development Plan] 2015–2019.

Gender Transforming Programming in Adolescent, Reproductive and Sexual Health - Lori A. Roller, MSW, MPH, 2014.

Gibson, C., and Woolcock, M in Voss, J. (2008). PNPM-Rural Baseline Project. Jakarta: The World Bank.

ILO, Gender Mainstreaming Strategies in Decent Work Promotion: Programming tools, 2006 – 2015

ILO (2007). The employment situation of people with disabilities: towards improved statistical information. Geneva: International Labour Organization.

KOMPAK, KOMPAK Three Year Guiding Strategy. Internal document-2015a.

KOMPAK (2015). KOMPAK Hierarchy of Outcomes. Internal document-2015b.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat adat di Indonesia: Menuju perlindungan sosial yang inklusif.

Plan International, Gender in Plan, 2012 – 2016.

Sushil, J. Connel & J. Burgess. 2016. Flexible Work Organizations: The Challenges of Capacity Building in Asia. Springer: New Delhi.

Sumner C, Kusmaningrum S (2014) Indonesia's Missing Millions: AIPJ Baseline Study on Legal Identity. Australian Aid, PEKKA and PUSKAPA UI.

Scanlon, M, et al. 2012. PNPM Gender Study 2012: Increasing the Quality of Women's Participation Final Report. Jakarta: PNPM Support Facility, The World Bank.

UNIDO Gender, Gender Mainstreaming Checklist for projects, 2014.

UNICEF (2012) Issue Briefs: Maternal and Child Health. Available at https://www.unicef.org/indonesia/A5-_E_Issue_Brief_Maternal_REV.pdf.

UNICEF, WHO, World Bank, United Nations (2015) Trends in Child Mortality Report 2014 Estimates Developed by the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation, New York: UNICEF.

UN Women, Gender mainstreaming in development programming, Guidance Note, New York-2014.

USAID (2004). Checklist for Inclusion.

WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division (2015) Trends in Maternal Mortality 1990 to 2015: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Geneva: WHO.

WHO & World Bank, 2011. World Report on Disability, p. 29.

Yulealawati (2016). Current Situation Of Early Childhood Education In Indonesia. MOEC: Jakarta.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Indonesia, 10320

T +62 21 8067 5000

F +62 21 3190 3090

E info@kompak.or.id

www.kompak.or.id